UNIVERSITAS GADJAH MADA
MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
QAIDA D UNTSA, Dr. AM Tri Anggraini, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
INTISARI ix
ABSTRACT x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah..... 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Keaslian Penelitian..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Barang dan/ atau Jasa 14
   1. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada BUMN 15
      a. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 18
      b. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 20
   2. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dengan Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur... 20
   3. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 23

B. Tinjauan Mengenai Mekanisme Penunjukan Langsung pada Pengadaan Barang dan/ atau Jasa 26
   1. Mekanisme Penunjukan Langsung pada BUMN 26
      a. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 26
      b. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 29
   2. Mekanisme Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

UNIVERSITAS GADJAH MADA
MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
QAIDA D UNTSA, Dr. AM Tri Anggraini, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dengan Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 30

C. Tinjauan Mengenai Larangan Persekongkolan dalam Tender dan Praktek Diskriminasi dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa 31
Larangan Persekongkolan Tender dan Praktek Diskriminasi di Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1999 31
a. Persekongkolan Tender (Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999)..... 32
b. Praktek Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Tertentu (Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999) 40
D. *State Action Doctrine* 43

BAB III METODE PENELITIAN
A. Sifat Penelitian 47
B. Jenis Penelitian 48
C. Analisis Data 50
D. Jalannya Penelitian..... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Dasar Hukum Mekanisme Penunjukan Langsung dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 53
B. Penerapan Hukum terkait Mekanisme Penunjukan Langsung pada BUMN Berdasarkan Putusan-Putusan KPPU 72
1. Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2010 (Perkara Pengadaan Lokomotif pada PT. KAI (Persero)) 72
2. Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 (Perkara Penunjukan Langsung pada Proyek *Outsourching Roll Out CIS-RISI* oleh PT. PLN (Persero)) 84
3. Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-L/2005 (Perkara Pengadaan Pekerjaan Konsultan dalam Tender Pengadaan Pipa Gas oleh PT. PGN Persero)) 95
C. Analisis terhadap Mekanisme Penunjukan Langsung dalam

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
QAIDA D UNTSA, Dr. AM Tri Anggraini, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha dan Peraturan Perundang-Undangan 115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 127

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN